

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BPKAD KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Chevin Aditya Cahyadi

NPP. 29.1250

*Asdaf Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [chevinadityac@gmail.com](mailto:chevinadityac@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Regional financial performance is one of the measures used to see the ability of a region in carrying out its regional autonomy, especially in implementing fiscal decentralization. However, there are still problems related to the financial performance of West Lombok Regency, such as the high transfer of funds to the local revenue of West Lombok Regency. Therefore, the purpose of this research is to measure how far West Lombok Regency is in implementing fiscal decentralization by looking at its regional financial performance. **Purpose:** This study aims to determine financial performance during the COVID-19 pandemic at BPKAD, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, to understand what factors are obstacles to financial performance during the COVID-19 pandemic at BPKAD, West Lombok Regency, Nusa Tenggara Province. West, and to describe what efforts have been made by the government to overcome obstacles in financial performance during the COVID-19 pandemic at BPKAD, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. **Method:** The method used in this study is a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data used in this study is the Budget Realization Report of the West Lombok Regency APBD as secondary data and the results of interviews as primary data. Data was collected using unstructured interview techniques and documentation techniques. Data analysis using data reduction analysis methods, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the research that have been carried out show that in general the financial performance of the West Lombok Regency is still relatively low, which can be seen from several financial ratios. The implementation of regional financial performance has several inhibiting factors so that it becomes an obstacle in regional financial management. Suggestions that can be given are increasing the efficiency of PAD, optimizing the intensification and extensification of sources of income according to the existing local authority and potential, as well as improving and developing the quality of human resources.

**Keywords: Regional Financial Performance, Financial Ratio.**

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kinerja keuangan daerah adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya terutama dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Namun masih terdapat permasalahan terkait dengan kinerja keuangan Kabupaten Lombok Barat seperti masih tingginya dana transfer terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengukur seberapa jauh Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dengan melihat kinerja keuangan daerahnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada masa pandemi covid-19 di BPKAD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam kinerja keuangan pada masa pandemi covid-19 di BPKAD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan untuk menggambarkan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kendala dalam kinerja keuangan pada masa pandemi covid-19 di BPKAD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Lombok Barat sebagai data sekunder dan hasil wawancara sebagai data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara tidak terstruktur dan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat masih tergolong rendah, yang dilihat dari beberapa rasio keuangan. Pelaksanaan kinerja keuangan daerah tersebut terdapat beberapa faktor penghambat sehingga menjadi suatu kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Saran yang dapat diberikan yaitu peningkatan efisiensi PAD, mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi asli daerah yang ada, serta peningkatan dan pengembangan kualitas SDM.

**Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan.**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah berlangsung sejak lama dengan kedaulatan mutlak berada pada pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan suatu perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri (otonomi daerah), dimana kekuasaan dan kewajiban untuk menyelenggarakan serta mengelola urusan pemerintahan daerah sendiri serta kepentingan masyarakat setempat dialihkan kepada pemerintah daerah. Suatu daerah dapat dikatakan maju dan berkembang jika daerah tersebut mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi. Di Indonesia, perkembangan sektor publik semakin pesat seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperbarui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan pada asas-asas penyelenggaraannya, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi serta asas tugas pembantuan. Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut, maka pemerintah daerah sebagai pelaku utama diharapkan mampu mengimplementasikan setiap kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi. Sehingga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dapat terlaksana secara maksimal dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi:

- a. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang undang, dan
- d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Selanjutnya, dalam program Nawa Cita ketujuh telah disebutkan, pemerintah daerah diberikan kewajiban dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah yang baik dan membutuhkan sumber daya yang baik, selain itu juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai di daerah tersebut. Kinerja fiskal pemerintah daerah yang diukur dengan analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 30 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pendapatan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sebagai daerah yang cukup strategis dan banyak tempat wisata, hal ini bisa memberikan peluang yang cukup besar bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menggali potensi daerah serta mengoptimalkan sektor pajak dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, seharusnya pendapatan asli daerah dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah di Kabupaten Lombok Barat. Berikut tabel pertumbuhan ekonomi dan total Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018-2020:

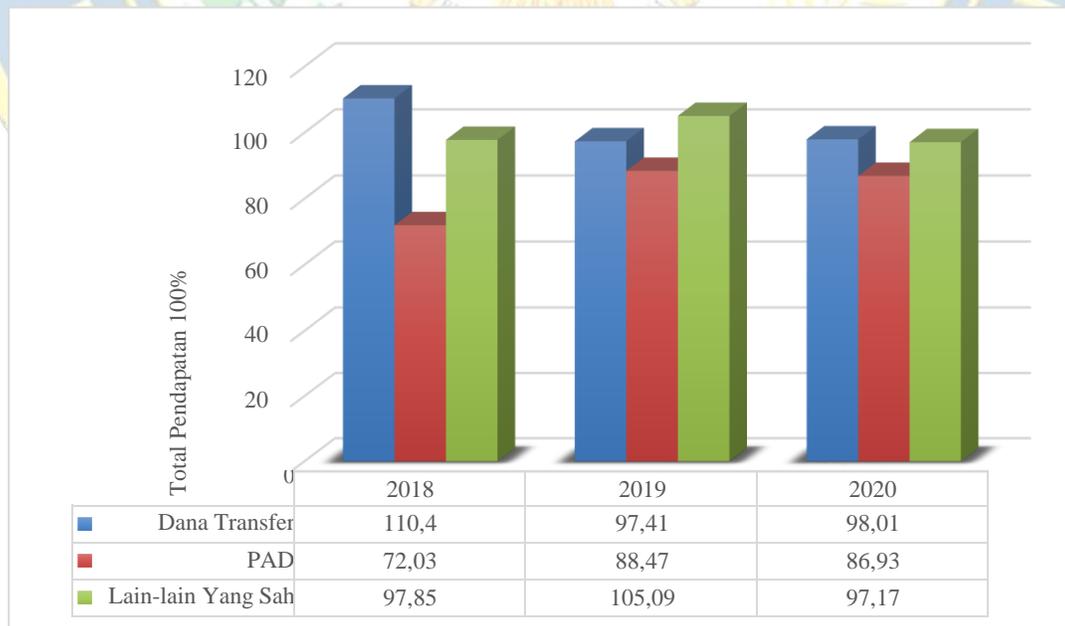
**Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018-2020**

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Pendapatan Daerah (Rp) | Realisasi Pendapatan Daerah (%) |
|-------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 2018  | 0,57                    | 301.153.695.173        | 72,03                           |
| 2019  | 3,84                    | 279.318.605.833        | 88,47                           |
| 2020  | -7,07                   | 274.456.916.993        | 86,93                           |

Sumber: BPS dan Kemenkeu (data diolah peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat masih mengalami fluktuasi begitu pula dengan realisasi pendapatan daerahnya. Namun demikian, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat sudah cukup baik dengan persentase 82,47%. Sebagai sumber pendapatan daerah yang cukup besar, PAD memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat.

**Kontribusi Dana Transfer, Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018-2020**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Barat (data diolah peneliti, 2021)

Jika dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan, dapat dilihat dalam grafik diatas bahwa sumber pendapatan terbesar Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masih berasal dari dana transfer. Jika dilihat dari perkembangannya, persentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat cenderung meningkat. Tetapi, pada proporsi pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat di anggaran tersebut masih mengalami perkembangan yang fluktuasi dan memiliki kontribusi lebih besar daripada pendapatan asli daerah. Sehingga hal ini menjadi gambaran bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mengelola keuangan masih perlu diadakan perbaikan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, perlu adanya pemecahan masalah agar kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan. Penelitian Syafia Nurul Aeni yang berjudul Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019, hasil penelitiannya yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih rendah sekali atau masih berpola instruktif karena rata-rata dari 2015-2019 yaitu 18,65%; Rasio Efektivitas PAD dikategorikan belum efektif, karena rata-rata efektivitasnya masih dibawah 100% yaitu sebesar 99,35%; Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong cukup efisien karena rata-rata besarnya ialah 85,2%; Rasio Keserasian sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga belanja modal relative kecil; dan Rasio Pertumbuhan mengalami fluktuasi dilihat dari perhitungan rasio pertumbuhan PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan serta pada belanja operasi mengalami kenaikan dan penurunan positif dibandingkan dengan pertumbuhan belanja modal. Penelitian Mosses Nelwan dan Iis Siti Aisah yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, hasil penelitiannya yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal mengalami kenaikan tiap tahunnya, sehingga rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal selama lima tahun anggaran berada pada persentase 12% dan masih dikriteria kurang; Rasio Kemandirian Keuangan Daerah rata-ratanya sebesar 14% sehingga belum mencapai persentase ideal dan dikriteria instruktif; dan Rasio Pertumbuhan PAD mengalami fluktuatif yang cenderung signifikan dan rata-rata pertumbuhan PAD dalam kurun waktu lima tahun yaitu sebesar 26%. Penelitian Erlangga Pati Kawa yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, hasil penelitiannya yaitu Rasio Kemandirian daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi anggaran tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi; Rasio Keserasian belanja operasi berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi; Rasio Keserasian belanja modal berpengaruh positif secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi; dan Kinerja keuangan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan terletak pada fokus dan lokus penelitian, penulis mengambil judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPKAD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian akan dibahas dan diukur menggunakan teori dari Halim (2012: 212) mengenai Analisis Kinerja Keuangan Daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan, yang akan dibahas guna memperoleh hasil kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat terhadap Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2018-2020. Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada masa pandemi covid-19 di BPKAD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam kinerja keuangan pada masa pandemi covid-19 di BPKAD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan untuk menggambarkan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kendala dalam kinerja keuangan pada masa pandemi covid-19 di BPKAD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **II. METODE**

Penelitian berfokus menurut masalah sehingga akan mengabaikan masalah lain yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang merupakan suatu metode dimana data yang terkumpul digambarkan sebagaimana adanya di lapangan pada saat peneliti melakukan penelitian atau suatu metode yang fleksibel yang bisa berkembang tergantung kondisi yang ada di lapangan dimana teori yang dibangun harus berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata ataupun gambar. Pada hasil akhir penelitian dapat ditarik kesimpulan dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Operasionalisasi variable adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan jenis, indikator, serta skala dari variable-variabel yang terikat dalam suatu penelitian. Peneliti membahas analisis rasio keuangan yang mencakup analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi, rasio Keserasian, dan rasio pertumbuhan. Peneliti menghitung kinerja keuangan dengan menggunakan analisis kinerja keuangan menurut Halim (2012: 212). Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data *paper* (dokumen) sebagai data sekunder dan *person* (informan) sebagai data primer yang bersifat sebagai pendukung. Peneliti memperoleh data tanpa harus turun langsung kelapangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder buku, surat kabar, dokumen terkait berupa laporan realisasi APBD tahun anggaran 2018-2020 dan data primer berupa keterangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. Adapun dalam menentukan informan pada penelitian kualitatif terdapat dua

teknik yang umumnya sering digunakan yaitu teknik snowball sampling dan teknik purposive sampling. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Teknik purposive sampling adalah teknik atau cara pengambilan sampel sumber informasi/data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dimaksudkan untuk menentukan informan yang sekiranya mampu memberikan data yang akurat untuk mendukung proses penelitian. Informan tersebut dapat berupa orang yang ahli pada bidang yang diteliti sehingga orang tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap permasalahan dilapangan. Pada penelitian ini, peneliti sendiri yang menentukan informan guna memperoleh berbagai data dan informasi terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Informan dimaksudkan peneliti, yaitu informan- informan yang ditemukan pada saat penelitian yakni orang-orang yang dapat memberikan informasi dalam memperoleh kelengkapan data yang dilakukan peneliti, sehingga jumlah informan seluruhnya lima orang dan akan disesuaikan pada saat peneliti melakukan penelitian. instrument penelitian yaitu peneliti akan terjun langsung ke lapangan atau lokus tempat penelitian. Peneliti dapat mengumpulkan data dan melihat kegiatan secara langsung di lokasi penelitian dengan panduan observasi, dan memilih informan untuk diwawancara dengan pedoman wawancara sehingga peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan faktual kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan dengan tepat terhadap penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan pemerintahan baik itu pembangunan daerah, pelayanan masyarakat, maupun hal-hal lain yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Rasio kemandirian keuangan akan memberikan kondisi kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah sebagai untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan tanpa melibatkan sumber pendapatan eksternal. Rasio kemandirian keuangan dapat dihitung dengan cara membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan eksternal. Berdasarkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Lombok Barat yang diperoleh peneliti pada saat penelitian dilapangan, maka peneliti menggunakan rumusan tersebut untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah Kabupaten Lombok Barat. Adapun rasio kemandirian daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Berikut kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat dapat diketahui dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yang dihitung berdasarkan data yakni sebagai berikut:

**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat  
Tahun Anggaran 2018-2020**

| Tahun  | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Pendapatan Transfer  | Rasio Kemandirian (%) |
|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2018   | 216.921.279.505,90           | 1.339.626.957.821,00 | 16,19%                |
| 2019   | 247.115.353.485,16           | 1.550.540.638.643,00 | 15,93%                |
| 2020   | 219.038.703.946,65           | 1.373.054.356.910,00 | 15,95%                |
| <b>Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</b> |                              |                      | <b>16,02%</b>         |

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel dan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan Abdul Halim (2002: 129) mengenai tingkat kemandirian, pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat berada pada interval antara 0%-25% dan dapat dikategorikan dalam pola hubungan yang “Instruktif” yang artinya kemampuan keuangan daerah yang termasuk dalam kategori Rendah Sekali, dimana peran dana transfer dari pemerintah pusat lebih dominan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan penggunaan PAD masih sangat minim sehingga penilaian bagi kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat masih sangat rendah atau dalam kata lain Kabupaten Lombok Barat belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara maksimal.

### 3.2 Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas menjelaskan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang di tetapkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) suatu daerah. Jika rasio yang dicapai paling sedikit 1 (satu) atau 100 persen, kemampuan daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya tergolong efektif. Semakin baik kompetensi daerah maka semakin tinggi rasio efektifitasnya. Kemampuan PAD, di sisi lain, sebanding dengan rasio efektifitasnya. Melalui analisis efektifitas yang dapat diketahui dari seberapa besar realisasi penerimaan PAD terhadap target yang seharusnya dicapai pada tahun anggaran tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi penerimaan PAD, hal tersebut diharapkan agar dapat mendorong kinerja pemerintah daerah untuk mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Rasio efektifitas dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100\%$$

Berikut rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Barat yang dapat dihitung menggunakan rumus di atas dan menghasilkan presentase sebagai berikut:

### Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018-2020

| Tahun                                  | Realisasi PAD (Rp) | Target PAD (Rp)    | Rasio Efektifitas (%) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>2018</b>                            | 216.921.279.505,90 | 254.444.383.760,37 | 85,25%                |
| <b>2019</b>                            | 247.115.353.485,16 | 281.812.802.076,19 | 87,68%                |
| <b>2020</b>                            | 219.038.703.946,65 | 251.904.996.796,71 | 86,95%                |
| <b>Rata-rata Rasio Efektifitas PAD</b> |                    |                    | <b>86,62%</b>         |

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa pertumbuhan rasio efektifitas Kabupaten Lombok Barat selama tiga tahun anggaran (2018-2020) mengalami peningkatan yang cukup baik. Sehingga dapat diartikan bahwa tingkat efektifitas kemampuan keuangan Kabupaten Lombok Barat dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan target yang ditetapkan setiap tahun anggaran tersebut cukup efektif. Rata-rata rasio efektifitas Kabupaten Lombok Barat dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 adalah 86,62%. Berdasarkan rata-rata tersebut, tingkat efektifitas kinerja keuangan Kabupaten Lombok Barat dalam merealisasikan pendapatan asli daerah selama tiga tahun anggaran (2018-2020) termasuk dalam kriteria “Cukup Efektif” dengan skala interval pada kriteria 80-90%.

### 3.3 Rasio Efisiensi PAD

Indikasi rasio efektifitas tidak cukup untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam memungut pendapatan PAD, karena meskipun rasio efektifitas sudah baik, jika biaya untuk mencapai tujuan sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD tidak efisien. Akibatnya, rasio efisiensi PAD harus dihitung. Rasio ini dihitung dengan membandingkan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan (dalam contoh ini belanja daerah) dengan realisasi penerimaan daerah yang dipungut. Melalui rasio efisiensi dapat diketahui seberapa besar efisien belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat. Pengukuran rasio efisiensi yaitu semakin tinggi rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin rendah. Sebaliknya semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dapat dicantumkan pada tabel sebagai berikut:

**Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran  
2018-2020**

| Tahun                            | Belanja Daerah (Rp)  | Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) | Rasio Efisiensi |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 2018                             | 1.419.620.896.553,21 | 1.651.940.748.000,90             | 85,93%          |
| 2019                             | 1.611.053.353.403,41 | 1.908.044.072.128,16             | 84,43%          |
| 2020                             | 1.530.227.274.193,73 | 1.687.931.694.537,65             | 90,65%          |
| <b>Rata-rata Rasio Efisiensi</b> |                      |                                  | <b>87 %</b>     |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut juga dapat dilihat besarnya rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan hasil bahwa efisiensi keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat terletak pada kriteria “Cukup Efisien”, karena hasil yang diperoleh pada perbandingan antara total realisasi belanja daerah terhadap pendapatan daerah berada pada rentang dari 80-90% dengan hasil rata-rata rasio efisiensi sebesar 87%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Barat cukup efisien dalam mengelola pengeluaran daerah yaitu belanja daerah.

### 3.4 Rasio Kesenjangan

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk belanja operasional dan modal semaksimal mungkin. Semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk biaya operasional, semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal untuk menawarkan fasilitas dan infrastruktur ekonomi masyarakat. Sebaliknya, semakin besar persentase dana yang dialokasikan untuk biaya operasional, semakin rendah persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal guna menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Berikut penghitungan rasio keserasian dari belanja operasi dan belanja modal pemerintah Kabupaten Lombok Barat:

#### a. Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan total belanja operasional dan total belanja daerah yang menentukan seberapa besar anggaran daerah dialokasikan untuk belanja operasional. Belanja operasional adalah belanja pemerintah jangka pendek, normal, dan berulang yang manfaatnya dibelanjakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi seringkali memiliki persentase biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang rendah. Rasio belanja operasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari penghitungan rasio keserasian belanja operasi di atas rasio keserasian belanja operasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat ditampilkan sebagai berikut:

**Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018-2020**

| Tahun                                  | Total Belanja Operasi (Rp) | Total Belanja Daerah (Rp) | Rasio Belanja Operasi |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 2018                                   | 1.102.398.341.466,91       | 1.419.620.896.553,21      | 77,65%                |
| 2019                                   | 1.165.071.271.363,58       | 1.611.053.353.403,41      | 72,31%                |
| 2020                                   | 1.132.853.395.232,73       | 1.530.227.274.193,73      | 74,03%                |
| <b>Rata-rata Rasio Belanja Operasi</b> |                            |                           | <b>74,66%</b>         |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Dapat dilihat dari tabel perhitungan rasio tersebut bahwa untuk belanja operasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif. Begitu juga untuk belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Dari setiap besaran rasio belanja operasi pada setiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa rasio keserasian belanja operasi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dapat dikatakan dalam keadaan baik karena berada pada rentang 60-90% dengan nilai rata-rata rasio belanja operasi dari tiga tahun terakhir yaitu 74,66%.

b. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal mengukur selisih antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal bermanfaat dalam jangka menengah dan panjang, serta teratur. Persentase belanja modal terhadap belanja daerah biasanya berkisar antara 5 hingga 20%. Rasio belanja modal ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mendanai modal perusahaan dalam rangka menjalankan operasi pengelolaan di Kabupaten Lombok Barat. Keuntungan jangka panjang dan menengah, serta manfaat rutin, semuanya disediakan oleh belanja modal. Rasio belanja modal ini dirumuskan seperti berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari penghitungan rasio keserasian belanja modal di atas, rasio keserasian belanja modal pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat ditampilkan sebagai berikut:

**Perhitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018-2020**

| Tahun                                | Total Belanja Modal (Rp) | Total Belanja Daerah (Rp) | Rasio Belanja Modal |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 2018                                 | 316.234.946.086,30       | 1.419.620.896.553,21      | 22,27%              |
| 2019                                 | 444.728.409.289,83       | 1.611.053.353.403,41      | 27,60%              |
| 2020                                 | 356.379.430.819,00       | 1.530.227.274.193,73      | 23,28%              |
| <b>Rata-rata Rasio Belanja Modal</b> |                          |                           | <b>24,38%</b>       |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan hasil dari penghitungan dapat diketahui bahwa rasio tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 27,60% dan yang terendah pada tahun 2018 yakni sebesar 22,27%. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 23,28% yang mengalami penurunan sebesar 4,32%. Rata-rata rasio belanja modal pemerintah Kabupaten Lombok Barat selama tiga tahun tersebut yaitu 24,38%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio belanja modal pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat dikatakan sudah mengarah ke yang lebih baik dikarenakan proporsinya berada lebih besar daripada 20%.

Dilihat dari jumlah rasio keserasian pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat belanja operasi yaitu belanja rutin (belanja aparatur daerah). Sedangkan belanja modal yaitu belanja pembangunan (belanja publik) yang berada pada keadaan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan keadaan pemerintahan yang terus berubah-ubah dan bukan berarti pemerintah daerah mulai memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi masyarakatnya.

### 3.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah telah mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan realisasi anggaran dari satu periode ke periode berikutnya. Potensi mana yang perlu mendapat perhatian dapat dinilai dengan memahami pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan belanja. Dalam penelitian ini peneliti mengukur rasio pertumbuhan PAD, belanja dan transfer. Rasio ini mengukur pertumbuhan PAD, belanja dan transfer dengan membandingkan realisasi tahun anggaran berjalan dikurang realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, atau dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan/Pengeluaran } X_n - X_{(n-1)}}{\text{Realisasi Penerimaan/Pengeluaran } X_{(n-1)}} \times 100$$

#### a. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Barat bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dapat mempertahankan atau memperluas PAD untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian masyarakat. Adapun rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Lombok Barat yang dapat dihitung berdasarkan dari rumus yang telah dicantumkan dan menghasilkan presentase sebagai berikut:

**Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018-2020**

| Tahun     | PAD $t_0$          | PAD $t_1$          | Rasio Pertumbuhan PAD |
|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2017-2018 | 290.993.583.144,35 | 216.921.279.505,90 | -25,45%               |
| 2018-2019 | 216.921.279.505,90 | 247.115.353.485,16 | 13,91%                |
| 2019-2020 | 247.115.353.485,16 | 219.038.703.946,65 | -11,36%               |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pertumbuhan PAD Kabupaten Lombok Barat bersifat fluktuatif, pada tahun 2018 yaitu sebesar -25,45% yang selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 13,91%. Pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan kembali hingga sebesar -11,36%. Setiap tahun anggaran dalam penelitian pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih belum mampu dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah jika dilihat dari grafik tersebut. Hal ini dapat terjadi akibat dari rendahnya pengelolaan PAD yang berujung pada ketergantungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

b. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

Tidak berbeda jauh dengan rasio pertumbuhan PAD, rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan belanja daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan demi kepentingan pembangunan dan pelayanan public. Adapun rasio pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan dari rumus yang telah disebutkan dan menghasilkan presentase sebagai berikut:

**Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018-2020**

| Tahun     | Belanja $t_0$        | Belanja $t_1$        | Rasio Pertumbuhan Belanja |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 2017-2018 | 1.467.749.945.870,51 | 1.419.620.896.553,21 | -3,27%                    |
| 2018-2019 | 1.419.620.896.553,21 | 1.611.053.353.403,41 | 13,48%                    |
| 2019-2020 | 1.611.053.353.403,41 | 1.530.227.274.193,73 | -5,01%                    |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja daerah di Kabupaten Lombok Barat dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja yang menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 diangka yang menunjukkan positif menjadi sebesar 13,48%.

Kenaikan belanja tersebut sejalan dengan kenaikan PAD pada tahun yang sama pada perhitungan rasio pertumbuhan PAD sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 pertumbuhan belanja daerah menurun hal ini juga seiring dengan penurunan PAD pada tahun tersebut.

c. Rasio Pertumbuhan Transfer Daerah

Rasio pertumbuhan transfer daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat yaitu mengukur pertumbuhan dana transfer yang diterima baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah provinsi selama tahun 2018 hingga tahun 2020. Berikut penghitungan rasio pertumbuhan transfer daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan rumus sebelumnya:

**Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018-2020**

| Tahun     | Transfer $t_0$       | Transfer $t_1$       | Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 2017-2018 | 1.367.400.034.171,00 | 1.339.626.957.821,00 | -2,03%                                |
| 2018-2019 | 1.339.626.957.821,00 | 1.550.540.638.643,00 | 15,74%                                |
| 2019-2020 | 1.550.540.638.643,00 | 1.373.054.356.910,00 | -11,44%                               |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan transfer daerah kabupaten Lombok Barat tersebut menunjukkan bahwa tiap tahunnya yang terjadi mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 2018 hingga pada tahun 2020, bahkan pada tahun 2020 mencapai angka negative yaitu -11,44%. Pada tahun 2018 menuju tahun 2019 rasio pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari -2,03% menjadi sebesar 15,74%. Akan tetapi Pada tahun 2019 menuju tahun 2020 rasio pertumbuhan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dan drastis dari 15,74% menjadi -11,44%. Diharapkan untuk rasio pertumbuhan pendapatan transfer pada tahun selanjutnya untuk mencapai angka yang stabil ataupun tidak menyentuh angka negatif.

**3.6 Faktor-faktor Penghambat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat**

Kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki pemerintah daerah atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak sangat diharapkan oleh pemerintah daerah manapun. Hal ini juga diinginkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat secara umum dan secara khusus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat. Kinerja keuangan daerah akan berjalan dengan baik tentunya dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar bagian keuangan itu sendiri. Faktor-faktor yang menjadi kendala kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat, dapat di jawab oleh peneliti dengan melihat hasil wawancara dari beberapa informan yaitu:

- a. Masih kurangnya PAD dari Kabupaten Lombok Barat selama tiga tahun anggaran dibandingkan dengan pendapatan transfer yang selalu besar setiap tahunnya;
- b. Penggunaan dana PAD yang masih kurang efisien dan kurang efektif sehingga menyebabkan tidak tepat sasaran dan mengalami kendala;
- c. Dikarenakan adanya bencana gempa bumi dan pandemi covid-19 yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak stabil dan menurun;
- d. Masih adanya tenaga kerja atau pegawai pada masing-masing SKPD terkhususnya di BPKAD Kabupaten Lombok Barat yang kurang memiliki kompetensi dalam bidang yang diampunya.

### **3.7 Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat**

Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Lombok Barat yaitu:

- a. Pengoptimalan Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- b. Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Covid-19 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia.

### **3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat dilihat dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan teori halim (2012), maka terlihat posisi kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat masih sangat kurang. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka pada tahun 2020 tren kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat menurun akibat adanya pandemi Covid-19. Inilah yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana pada penelitian sebelumnya pandemi Covid-19 belum terjadi sehingga dampak dari pandemi tersebut seperti adanya pembatasan jam operasional bahkan penutupan objek-objek penerimaan daerah. Hal ini hanya dirasa pada saat peneliti melakukan penelitian ini yakni pada saat pandemi Covid-19 berlangsung.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder serta hasil wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan di BPKAD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2018-2020 dimasa pandemi covid-19 sebagai berikut:
  - a. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat dalam tiga tahun anggaran yaitu 16,02% dimana kemampuan keuangannya tergolong rendah sekali;
  - b. Rata-rata rasio efektifitas Kabupaten Lombok Barat dalam tiga tahun anggaran yaitu 86,62% dimana kriterianya tergolong cukup efektif;
  - c. Rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Lombok Barat dalam tiga tahun anggaran yaitu 87%

- dimana kriterianya tergolong cukup efisien;
- d. Rasio keserasian belanja Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu tiga tahun anggaran menunjukkan bahwa rata-rata rasio belanja operasi Kabupaten Lombok Barat sebesar 74,66% dan rata-rata rasio belanja modal Kabupaten Lombok Barat sebesar 24,38%;
  - e. Rasio pertumbuhan PAD, belanja daerah, dan transfer daerah dalam tiga tahun anggaran bersifat fluktuatif.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat, dapat di jawab oleh peneliti dengan melihat hasil wawancara dari beberapa informan yaitu:
- a. Masih kurangnya PAD dari Kabupaten Lombok Barat selama tiga tahun anggaran dibandingkan dengan pendapatan transfer yang selalu besar setiap tahunnya;
  - b. Penggunaan dana PAD yang masih kurang efisien dan kurang efektif sehingga menyebabkan tidak tepat sasaran dan mengalami kendala;
  - c. Dikarenakan adanya bencana gempa bumi dan pandemi covid-19 yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak stabil dan menurun;
  - d. Masih adanya tenaga kerja atau pegawai pada masing-masing SKPD terkhususnya di BPKAD Kabupaten Lombok Barat yang kurang memiliki kompetensi dalam bidang yang diampunya.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor kendala kinerja keuangan sekaligus meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat adalah:
- a. Pengoptimalan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan asli daerah;
  - b. Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dalam hal ini pegawai-pegawai yang mau ataupun yang sudah memiliki dasar dalam bidang pengelolaan keuangan daerah ataupun sesuai dengan bidang-bidang yang berkaitan. Terkhususnya pada bidang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang banyak membantu dan membimbing serta memberi dukungan, motivasi dan doa kepada peneliti selama ini. Maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga tercinta dan segenap pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat yang banyak membantu dan mensukseskan selama proses magang dan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara Kaswan. 2017. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kuswandi, A. 2016. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam 45 (Unisma).
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF. Masram. 2017. *Manajemen Sumber Daya Profesional*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Neuman, W. L. 2006. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. United States of America: Pearson Education, Inc.
- Rismawati. & Mattalata. 2018. *Evaluasi Kinerja: Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

**C. Sumber Internet**

<https://bpkad.lombokbaratkab.go.id/>

<https://lombokbaratkab.bps.go.id/>

<http://www.kemenkeu.go.id/>

**D. Sumber Lainnya**

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2018.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2019.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2020.

